

ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Annis Susanti, Septa Riadi, Deviana Sari

¹Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, ²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,

³Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,

annis.susanti@gmail.com¹, septa.riadi.sr@gmail.com², devianasari.18@gmail.com³

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan rasio belanja negara pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berdasarkan pagu dan realisasi belanja negara periode TA. 2016 – TA. 2021. Teknik analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan yaitu perbandingan angka yang diperoleh dari hasil satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Periode analisis belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP TA. 2016 – TA. 2021 dan diperoleh hasil rasio tertinggi atas analisis keserasian belanja operasi terhadap total pagu belanja sebesar 99,67% pada tahun 2021 dan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 32,49%, rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi sebesar 9,71% yaitu pada Tahun 2021 dan rasio terendah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu 0,45%, Sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja tertinggi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 99,55% dan terendah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu 90,29 %. Rasio analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja pada laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016 - TA. 2021 berada pada kriteria rasio antara 90% - 100% dengan kategori rasio keserasian belanja adalah “Efektif”. Analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja negara melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran.

Kata Kunci : Belanja Negara, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan.

RATIO ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON FINANCIAL STATEMENTS DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES

Annis Susanti, Septa Riadi, Deviana Sari

¹Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, ²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,

³Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,

annis.susanti@gmail.com¹, septa.riadi.sr@gmail.com², devianasari.18@gmail.com³

Abstract. This research aims to determine ratio of state expenditures and quality in the financial statements of Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources base on budget period of TA. 2016 until TA. 2021. The technique of analyzed ratio use financial ratios to compared spending with total government spending, the highest ratio results from operating expenditures to the total expenditure is 99,67% in TA. 2021 and the lowest ratio in TA. 2016 is 32,49%. The highest ratio of capital expenditures to the total expenditure is 9,71% in TA. 2021 and the lowest ratio in TA. 2017 is 0,45% while the highest ratio of direct expenditure to total expenditure is 99,55% in TA. 2021 and the lowest ratio is 90,29% in TA. 2017. The results of analyzed government spending in the financial statements of Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources base on budget period of TA. 2016 until TA. 2021 is “Effective” with criteria results between 90% until 100%. It is hoped that quality of government spending can be improved through improvements in government policies and budgeting processes

Keywords: Government Expenditure, Financial Ratios, Financial Statements

PENDAHULUAN

Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban tersebut (Rahayu, 2010) yang tertuang di dalam anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja negara yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus (PP 71, 2010).

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan dan Pengelolaan keuangan negara di atur Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" (UU 17, 2003). APBN secara garis besar terdiri dari komponen pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan.

Keuangan negara yang dialokasikan dalam anggaran belanja negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terdiri dari anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Atas alokasi anggaran belanja tersebut Direktorat Jenderal PSDKP wajib menyusun Laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja negara setiap periode tahun anggaran. Belanja negara yang dialokasikan harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, sehingga perlu dilakukan analisis atas keserasian belanja negara pada laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dengan tujuan peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca / laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan. Laporan keuangan tahunan meliputi : Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan laba ditahan dan Laporan Arus Kas. Dalam laporan

keuangan terdapat dua macam informasi penting yang diperoleh para pemegang saham, yaitu bagian dari uraian, yang berupa kata pengantar dari pucuk pimpinan, perusahaan, yang menggambarkan hasil usaha kegiatan perusahaan selama satu periode (satu tahun) yang lalu serta membahas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi yang akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermantaaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aktivitas ekonomi di Indonesia dapat dibagi ke dalam sektor privat, sektor publik dan sektor nir laba. Khususnya di sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan berarti: "menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat." (Harahap, 2006). Bagi organisasi privat, analisis laporan keuangan pada umumnya meliputi : a. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek. b. Rasio leverage adalah rasio yang mengukur

perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur. c. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan. d. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya. Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik belum begitu banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul Halim, 2007). Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda perlu dilaksanakan, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan Pemda berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki organisasi privat. Pemda yang memiliki tugas menjalankan kegiatan pembangunan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor

publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002) Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah kepada DPRD untuk dinilai apakah Pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. salah satu alat untuk menilai Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan Analisis Rasio terhadap Anggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam praktek ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang bisa diterapkan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan antara lain (Marsudi, 2002)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian analisis keserasian belanja negara pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2014). Sedangkan dalam Nazir (2003) metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2014). Sedangkan dalam Nazir (2003) metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian dilakukan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan waktu penelitian yaitu sejak 31 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2022 yang terdiri dari beberapa tahapan dimulai tahap persiapan penelitian berupa penyusunan proposal penelitian, observasi lapangan, pengumpulan data sekunder sampai pada tahap pengolahan data dan penarikan kesimpulan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh langsung dari data e-rekon Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data omspan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data realisasi belanja pada SAS Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

Salah satu metode analisis data yaitu dengan melakukan teknik analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan rasio keuangan terhadap belanja negara pada Laporan Keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode anggaran Tahun 2016 s.d Tahun 2021. Analisis keserasian belanja ini merupakan salah satu usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peneliti menggunakan perhitungan rasio analisis keserasian belanja yang terdiri dari rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja. Belanja operasi terdiri dari realisasi atas belanja pegawai dan realisasi atas belanja barang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio analisis keserasian belanja modal terhadap total belanja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio analisis keserasian belanja langsung terhadap total belanja, dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan analisis rasio keserasian belanja negara yang dilakukan dapat digunakan untuk mengukur kriteria efektivitas presentasi kinerja keuangan dalam realisasi atas pelaksanaan belanja negara yang mengacu pada kriteria efektivitas presentasi kinerja keuangan atas pelaksanaan belanja negara sebagaimana tertuang dalam Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Efektifitas Presentasi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor: 690.900.327, 1994.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Postur anggaran belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP untuk periode anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami fluktuasi dengan rata - rata fluktuasi berdasarkan data

dari *e-Rekon* dan laporan keuangan, omspan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data SAS adalah sebesar 57 % untuk belanja pegawai, belanja barang sebesar 39% dan belanja modal sebesar 3%. Berikut Grafik Postur Anggaran Belanja Negara dapat di lihat pada Gambar 1. Berikut ini:

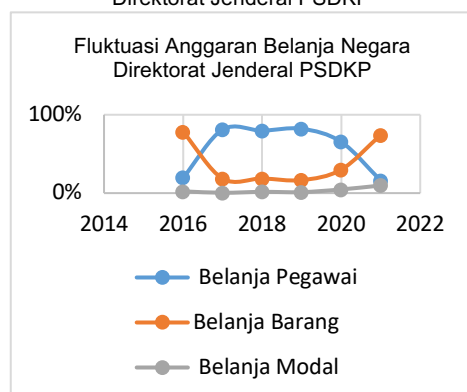
Gambar 1. Grafik Postur Anggaran Belanja Negara Direktorat Jenderal PSDKP



Sumber: Data Kementerian Keuangan RI, 2021

Dan grafik fluktuasi belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut ini:

Gambar 2. Grafik Fluktuasi Anggaran Belanja Negara Direktorat Jenderal PSDKP



Sumber: Data Kementerian Keuangan RI, 2021

Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja periode TA. 2016 s.d TA. 2021 menunjukkan peningkatan rasio yang signifikan dengan rasio tertinggi pada tahun 2021 yaitu 99,67% dan rasio terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 32,49%. Berikut rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja Direktorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan atas rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan bahwa rasio terendah yaitu pada Tahun Anggaran 2017 dengan rasio sebesar 0,45% dan rasio tertinggi pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 9,71%. Sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja. Rasio belanja langsung terhadap total belanja menunjukkan bahwa belanja langsung pada Direktorat Jenderal PSDKP periode TA 2016 – TA. 2021 berada pada kriteria 90% - 100% hal menunjukkan bahwa belanja langsung yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016 s.d TA. 2021 masuk dalam kategori efektif.

PENUTUP

Kesimpulan hasil analisis keserasian belanja pada Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016 s.d TA. 2021, adalah:

1. Alokasi anggaran belanja pegawai pada Direktorat Jenderal PSDKP untuk periode TA.2016 – TA. 2021 cenderung mengalami penurunan, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan;
2. Pada rasio keserasian belanja operasi terhadap total pagu belanja periode TA.2016 – TA.2021 menunjukan bahwa rasio tertinggi yaitu pada TA. 2021 sebesar 99,67% dan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 32,49%;
3. Pada rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukan bahwarasio tertinggi sebesar 9,71% yaitu pada Tahun Anggaran 2021 dan rasio terendah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu 0,45%;
4. Sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja tertinggi adalah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 99,55% dan terendah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu 90,29 %;
5. Analisis keserasian belanja pada Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016- TA. 2022 masuk pada kategori efektif dengan rasio antara 90% - 100%.

Implikasi kebijakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil analisis keserasian belanja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Usulan pengajuan anggaran belanja negara agar disusun berdasarkan keserasian belanja, tingkat kewajaran, terukur dan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif;

2. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan selalu menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP dan realisasi anggaran tepat waktu dan pencapaian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar memberikan multiplier efek bagi masyarakat;
3. Peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran harus selalu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal PSDKP. 2016. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2017. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2018. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2019. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2020. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020.
- Direktorat Jenderal PSDKP. 2021. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.
- Harahap Sofyan Sahri, 2006. *Analitis Kritis atas Laporan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Halim Abdul , 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan*

- Daerah, Edisi ., Salemba Empat, Jakarta*
- I Made Winartha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2016. Data e-Rekon & LK 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2017. Data e-Rekon & LK 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2018. Data e-Rekon & LK 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2019. Data e-Rekon & LK 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2020. Data e-Rekon & LK 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2021. Data e-Rekon & LK 2021.
- Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta
- Mahmudi (2007), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Nazir,M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara
- Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek